



HINDARI TUMPANG TINDIH KEGIATAN

Tanggulangi Kemiskinan Manfaatkan Teknologi Informasi

YOGYA (KR) - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogya, mengembangkan sistem teknologi informasi guna mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal itu agar berbagai program pemberdayaan yang diampu oleh beberapa instansi bisa lebih sinergis dan terhindar dari tumpang tindih.

Sekretaris TKPK Kota Yogya Edy Muhammad menuturkan, pendekatan baru berbasis teknologi informasi tersebut sudah diatur melalui Perwal 60/2015. "Harapannya, TKPK di tingkat kota maupun wilayah bisa melakukan monitor dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi warga miskin," katanya, Minggu (3/1).

Intervensi warga miskin diwujudkan dalam program kegiatan yang mengedepankan pemberdayaan. Terdapat tujuh aspek yang menjadi target intervensi, yakni sandang, pangan, papan, pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sosial. Setiap instansi di tingkat kota maupun kecamatan dan kelurahan yang sudah mengulirkan program intervensi, diwajibkan membuat laporan dalam sistem informasi teknologi.

Dengan demikian, jika terdapat instansi lain yang hendak menggelar program serupa, dapat melihat sistem tersebut agar sasarannya lebih merata. "Sehingga tidak ada lagi warga miskin di satu tempat mendapatkan program berkali-kali, karena warga yang sudah mendapat intervensi sudah bisa terlihat. Dengan begitu, sasarannya bisa merata dan pengentasan kemiskinan lebih cepat," imbuh Edy.

Terkait penduduk miskin, Pemkot Yogya memiliki acuan yang diperbarui setiap tahun melalui program Kartu Menuju Sehat (KMS). Jumlah penduduk yang menjadi sasaran perlindungan sosial pada 2014 tercatat 60.230 jiwa atau 14,55 persen dari total penduduk.

Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), baru tersaji tahun 2013 sebanyak 35.516 jiwa atau 8,82 persen. Data milik pemkot jauh lebih banyak lantaran mencakup penduduk rentan miskin.

Edy mengungkapkan, selain menyiapkan sistem pihaknya juga tengah menunggu hasil pendataan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dilakukan tahun ini. Diprediksi, hasil pendataan tersebut baru bisa diakses pada awal 2016. "Data itu akan disajikan dalam sistem teknologi informasi dan disandingkan dengan data KMS. Bisa jadi, ada warga miskin hasil pendataan TNP2K yang belum terakomodasi dalam KMS sehingga bisa menjadi sasaran intervensi," paparnya.

Oleh karena itu, jika seluruh data warga miskin sudah semakin valid, maka seluruh program pemberdayaan harus diprioritaskan sesuai data dalam sistem tersebut. Selama ini banyak kegiatan pelatihan keterampilan yang pesertanya hanya ditawarkan secara terbuka tanpa mempertimbangkan status ekonominya. (Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005